

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2012**

**Oleh :**

**Vidya Nurrul Fathia**

**(14010110141020)**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

**This study aims to concern about issues related to participation of Bekasi citizen in 2012 election of Bekasi mayor and vice mayor. Based on data, Bekasi citizen gave a small number in voting. The study aims to investigate the cause of this issue. The study was conducted with qualitative methods to explain factors related to low voter participation in Bekasi city's mayor and vice mayor election. Analysis of this study was combined primary and secondary data along with interview to 20 informants. The results showed that the election was being held during the time when voters as they chose not vote, second factor is the mayor and vice mayor aren't reliable candidates based on voter's expectation. The last factor is many voter in Bekasi was disappointed with the previous mayor. Some voters become apathetic as the result of previous selection. My research suggests that increasing voters's participation is not only related to the committee of the election task but also needs more attention and concerns from the local government and society in the area itself as the main point of this event.**

***The key word: Citizen's participation, Head of district's election***

## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) seringkali dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu negara benar-benar telah melaksanakan demokrasi (Renstra KPU Tahun 2002-2005). Pada Pemilu dibutuhkan partisipasi masyarakat. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai Jaminan Hak-Hak Sipil Dan Politik, dimana terdapat hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan dan lain-lain.

Pada tanggal 16 Desember 2012, Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota. Ada lima pasangan calon yang maju, baik yang diusung oleh koalisi partai-partai politik maupun perseorangan (independen).

Pemilukada Kota Bekasi tersebut berlangsung lancar, namun demikian menyisakan permasalahan yaitu tingginya angka masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih lebih dari 50%. Hal ini menimbulkan pertanyaan, Kota Bekasi merupakan Kota metropolitan dan secara wilayah geografis berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Sebagai kota metropolitan, mayoritas masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat yang melek terhadap teknologi sehingga dapat mengakses informasi dengan mudah, namun dengan karakteristik ini mempunyai tingkat partisipasi dalam Pemilukada yang rendah menarik untuk di teliti.

## **B. PEMBAHASAN**

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan propinsi lain yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibukota negara ini memberikan beberapa keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kondisi alam Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°55' bujur timur dan 6°7' - 6°15' lintang selatan. Secara geografi Kota Bekasi berada pada posisi 106°55' bujur timur dan 6°7'- 6°15' lintang selatan.

Sesuai dengan Perda Kota Bekasi nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 56 kelurahan. Kota Bekasi memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah yang terluas (24,73 km<sup>2</sup>) sedangkan Kecamatan Bekasi Timur sebagai wilayah terkecil (13,49 km<sup>2</sup>). Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
3. Sebelah Barat : Propinsi DKI Jakarta
4. Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan informasi dari 20 informan melalui wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Bekasi Timur kelurahan Margahayu disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya, Kesibukan atau

Aktivitas Masyarakat Bekasi seperti tidak berada di tempat dan kesibukan atau aktivitas ekonomis, Alasan teknis seperti tidak terdaftar dalam pemilih, Calon Pasangan yang ada tidak sesuai dengan kriteria masyarakat, Persepsi Masyarakat terhadap Pemilukada menyebabkan sikap apatis dan pesimis.

1. Golput karena pertimbangan ekonomis. Pertimbangan ekonomis ini biasanya dihadapi oleh kelompok yang terdiri dari rakyat kecil yang bermata pencaharian pada sektor informal, dimana penghasilannya sangat terkait dengan intensitas pekerjaan, sehingga masyarakat pada kelompok ini akan merasa rugi apabila meninggalkan pekerjaan tersebut.
2. Golput karena alasan teknis Golput dengan alasan teknis ini cenderung dilakukan dimana pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain:
  - a. Kesalahan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pendataan nama-nama calon pemilih sehingga pemilih tersebut tidak terdaftar sebagai Pemilih tetap dan tidak mendapatkan kartu untuk memilih
  - b. Kesalahan dari pihak pemilih itu sendiri, misalnya pemilih telah terdaftar, akan tetapi pada hari “H” yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk hadir memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena ada hal lain yang lebih penting.
3. Calon pasangan yang ada tidak sesuai dengan kriteria masyarakat. Masyarakat tidak cocok dengan calon yang ada pada pemilukada. Kriteria masyarakat terhadap calon Walikota dan Wakil Walikota tidak terdapat pada calon pasangan yang ada.
4. Persepsi Masyarakat terhadap Pemilukada menyebabkan sikap apatis dan pesimis. Pempimpin sebelumnya tidak membawa perubahan sehingga masyarakat berpikir

bahwa sama saja kepemimpinan yang lama dan yang baru. Persepsi ini menimbulkan sikap apatis dan Pesimis. Dengan alasan apatis dan pesimis ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- a. Sikap tidak percaya dengan pemerintah dan calon yang ada. Akibatnya pemerintah menjadi tidak bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka di karenakan masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi.
- b. Kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan. Hal ini disebabkan banyak pemilih yang belum mengenal pemimpinnya, selain wajah-wajah yang terpampang di baliho-baliho kampanye maupun iklan di media massa, terlebih lagi nyaris tidak ada calon yang memaparkan program-programnya dengan jelas. Sehingga masyarakat menjadi ragu dan lebih memilih untuk golput.
- c. Ketidaktahuan kapan jadwal pemilihan. Hal ini lebih disebabkan kurangnya peranan media atau KPPS dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan Pemilu kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kapan jadwal pelaksanaan Pemilu.

## **C. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini difokuskan pada partisipasi politik masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Partisipasi politik dalam masyarakat sangat luas. Namun yang dibahas dalam penelitian ini adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Dari penelitian yang dilakukan dengan wawancara, peneliti mendapatkan data yang kemudian dianalisis dan dibahas. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan:

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Bekasi tergolong rendah, baik dari presentase jumlah pemilih yang menggunakan hak suara maupun dari kurangnya partisipasi masyarakat

dalam pilukada seperti keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi, masyarakat tidak mengetahui profil pasangan calon walikota dan wakil walikota, masyarakat tidak ikut serta dalam kampanye dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa faktor penyebab. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya mempunyai alasan mengapa tidak menggunakan hak pilihnya, seperti kesibukan atau aktivitas masyarakat Kota Bekasi, Calon pasangan yang ada tidak sesuai dengan kriteria masyarakat, tidak ada perubahan yang terlihat setelah pergantian pemimpin, pemimpin lama melakukan korupsi membuat kepercayaan terhadap pemimpin berkurang.

## **Saran**

1. KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara pilukada bisa meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat, terbukti dengan sudah dilakukannya sosialisasi secara langsung maupun lewat spanduk dan radio tingkat partisipasi masyarakat Kota Bekasi masih rendah. Banyak cara sosialisasi yang dapat dilakukan yang terpenting adalah menarik dan mampu mengajak masyarakat untuk berperan aktif di dalam pilukada.
2. Lembaga pemerintah terkait dan partai politik bisa membantu KPU Kota Bekasi sebagai penyelenggara Pilukada memberikan edukasi politik kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih agar bisa meminimalisir rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
3. Pemerintah daerah Kota Bekasi sudah seharusnya menerapkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat, tantangan pemimpin baru walikota dan wakil walikota yang sudah terpilih untuk bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa terdapat perubahan yang lebih baik dan dirasakan oleh masyarakat

untuk mengembalikan tingkat kepercayaan terhadap pemimpin dan untuk meningkatkan partisipasi di daerah untuk pemilu yang akan datang.

4. Masyarakat hendaknya lebih aktif dalam berpartisipasi politik terutama dalam pemilihan umum kepala daerah karena partisipasi masyarakat ikut menentukan kebijakan yang diterapkan di daerahnya, jika masyarakat berperan aktif ikut mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan surat suara yang tidak digunakan dan dengan berpartisipasi aktif ikut membantu pemerintah pusat dalam membangun daerahnya masing-masing berperan sebagai alat kontrol pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2009. *Pilkada Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. Bandung: PT.Remaja

Rosdakarya.

Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Pustaka Utama.

Budiyanto. 200. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.

Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis*

*dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

*Demokrasi Lokal*. 2012. Jakarta: Konstitusi Press.

Gaffar, Afan. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.

Gatara, Said. 2007. *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan*

*Kajian*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Gaventa, John dan Camilo Valderama. 2001. *Mewujudkan Partisipasi: Teknik*

*Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21 dalam The British Council New Economics*

*Foundation*.

Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi,*

*Demokrasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI-Press.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelaon. 1994. *Partisipasi Politik di Negara*

*Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kartono, Kartini. 2006. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada.

Mas' oed, Mohtar dan MacAndrews. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Melfa, Wendy. 2013. *Pemilukada (demokrasi dan otonomi daerah)*. Lampung: Be Press.

Michels, Robert. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Rajawali

Press, Jakarta.

Nur, Iman. 2008. "*Civil Society*" ke "*Blok Demokratik*": *Masalah dan*

*Tantangannya di Indonesia*. Jakarta

Rush, Michael dan Althoff, Philip. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Indonesia.

Sanit, Arbi (Eds). 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput*. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta.

Wahid, Abdurrahman, Halim HD, Dkk. 2009. *Mengapa Kami Memilih Golput*.

Jakarta: Sagon

## **Artikel Harian dan Lain-lain**

Budi, Suryadi. 2007. Sosiologi Politik Sejarah, Definisi, dan Perkembangan konsep, Jogjakarta: IRCiSoD 128. Diunduh pada tanggal 25 Januari Pukul 13.00 WIB

Soebagio. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 12, No. 2, Desember 2008: 82-86. Diunduh dari alamat situs Journal.ui.ac.id pada tanggal 26 Januari Pukul 16.00 WIB

Masitoh, Dewi. Utomo, Susilo, Dkk. Fenomena Golput Pada Pilkada Pati 2011. Diunduh dari alamat situs ejournal-s1.undip.ac.id pada tanggal 26 Januari Pukul 16.30 WIB

Sirajudin, Hubungan Pusat-Daerah: Konsepsi, Problematika, dan Alternatif Solusi, Konstitusionalisme Demokrasi, 2010, hlm. 154. Diunduh pada tanggal 27 Januari 19.00 WIB

Faizil, Aziz. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010. Diunduh pada tanggal 08 Maret Pukul 10.00

## **Penelitian**

Marlini Tarigan. 2008. *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Temanggung Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2008*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Strategi Koalisi Partai Demokrat Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013. Skripsi Universitas Hasanudin Makasar